

## **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK OPTIMALNYA FUNGSI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI MALUKU UTARA DI KECAMATAN OBA UTARA**

Rudiya Muhammad<sup>1</sup> & Ingerid L. Moniaga<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi

<sup>2</sup> Staf Pengajar Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi

E-mail: [rudiyamhammad76@gmail.com](mailto:rudiyamhammad76@gmail.com)

### **Abstrak**

Kecamatan Oba Utara Sebagai satu-satunya kecamatan yang berada di Kota Sofifi ini memiliki infrastruktur dan fasilitas yang belum memadai untuk ditetapkan sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Pemandahan pusat pemerintahan dan seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi di Kecamatan Oba Utara sudah berlangsung sejak tahun 2010. Permasalahan pemindahan kawasan pusat pemerintahan ini juga menimbulkan perubahan jarak pegawai ke tempat kerja, waktu, transportasi yang berdampak pada sumbu ekonomi, pendapatan dan pengeluaran pegawai. Perubahan lokasi kerja dan tempat tinggal mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas bekerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Biaya transportasi yang tinggi dan lamanya perjalanan mengakibatkan pegawai ASN sering terlambat menjalankan tugasnya sesuai waktu lima hari kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tidak optimalnya fungsi kawasan pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Oba Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor-faktor penyebab tidak optimalnya fungsi suatu Kawasan pusat Pemerintahan provinsi Maluku Utara di Kecamatan Oba Utara adalah Faktor perubahan jarak, Moda Transportasi, juga perubahan waktu tempuh dan biaya atau pengeluaran berpengaruh terhadap tidak optimalnya Fungsi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Oba Utara.

**Kata kunci:** *Faktor-Faktor, Tidak Optimal, Kawasan Pusat Pemerintahan, Provinsi Maluku Utara, Kecamatan Oba Utara*

### **PENDAHULUAN**

Provinsi Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang secara resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Maluku dan beribukota di Sofifi. Kecamatan Oba Utara Sebagai satu – satunya kecamatan yang berada di Kota Sofifi ini memiliki infrastruktur dan fasilitas yang belum memadai untuk ditetapkan sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Setelah pembangunan cukup lama dari tahun 2000 sampai 2010 kini Sofifi telah memiliki fasilitas seperti kantor Gubernur, DPRD, Kejaksaan Tinggi, Kantor Kepolisian Daerah, serta kantor-kantor Dinas Pemerintah Provinsi. Pemandahan pusat pemerintahan dan seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi di Kecamatan Oba Utara sudah berlangsung sejak tahun 2010.

Perpindahan kawasan pusat pemerintahan ini dapat menyebabkan

tingginya permintaan jasa transportasi penyebrangan antar pulau, Ternate dan pulau Halmahera menyebabkan jadwal operasi sehingga tentunya akan menyebabkan jadwal operasi penyebrangan antar pulau meningkat. Permasalahan pemindahan kawasan pusat pemerintahan ini juga menimbulkan perubahan jarak pegawai ke tempat kerja, waktu, transportasi yang berdampak pada sumbu ekonomi, pendapatan dan pengeluaran pegawai. Perubahan lokasi kerja dan tempat tinggal mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas bekerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Biaya transportasi yang tinggi dan lamanya perjalanan mengakibatkan pegawai ASN sering terlambat menjalankan tugasnya sesuai waktu lima hari kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Permasalahan-permasalahan tersebut mendorong penulis ingin melakukan penelitian tentang faktor-faktor penyebab tidak optimalnya fungsi kawasan pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Oba Utara.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kawasan Pusat Pemerintahan

Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mendefinisikan Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Pusat pemerintahan didefinisikan sebagai tempat yang menjadi kedudukan utama pemerintahan. Menurut PSPPR Pusat pemerintahan juga didefinisikan sebagai satu fungsi wilayah yang digunakan untuk kegiatan pelayanan pemerintahan yang didalamnya terdapat kantor-kantor pemerintah dan berbagai fasilitas yang menunjang untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintah yang memiliki posisi sangat *central*.

### Pemisahan Fungsi Pusat Pemerintahan dengan Pusat Kota

Pengembangan sebuah pusat pemerintahan menjadi sebuah kota baru sebenarnya memerlukan beberapa persyaratan penting yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Lokasinya harus jauh dari kota lainnya, terutama kota induk (40-80 km).
2. Secara sosial ekonomis, kota baru tersebut harus memiliki potensi yang mampu menunjang kehidupan sendiri (memiliki kemandirian, tidak tergantung pada kota lain).
3. Secara fisik, sebuah kota baru secara spasial memiliki sistem dan bentuk kota yang spesifik sesuai dengan sifat fisik dan geografisnya.

### Teori Lokasi

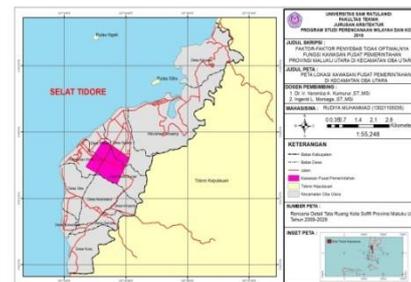
Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial.

Landasan dari lokasi adalah ruang (*space*). Tanpa ruang maka tidak mungkin ada sebuah lokasi. Salah satu unsur ruang adalah jarak. Jarak menciptakan gangguan ketika manusia berhubungan atau bepergian dari satu tempat ketempat lainnya. Jarak menciptakan gangguan karena dibutuhkan waktu dan tenaga (biaya) untuk mencapai lokasi yang satu dari

lokasi lainnya. Selain itu, jarak juga menciptakan gangguan informasi sehingga makin jauh dari suatu lokasi makin kurang diketahui potensi/karakter yang terdapat pada lokasi tersebut. Makin jauh jarak yang ditempuh, makin menurun minat orang untuk bepergian dengan asumsi faktor lain semuanya sama. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat bagaimana suatu lokasi yang memiliki potensi/daya tarik terhadap batas wilayah pengaruhnya dimana orang masih ingin mendatangi pusat yang memiliki potensi tersebut. Hal ini terkait dengan besarnya daya tarik pada pusat tersebut dan jarak antara lokasi dengan pusat tersebut.

## METODE PENELITIAN

Lokasi kawasan pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Oba utara ini terletak di Kelurahan Sofifi, desa Galala, desa durian dan desa Balbar.



Gambar 1 peta lokasi kawasan pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara

Jenis pendekatan dalam penelitian Ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skala likert dan SPSS. Skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi Pegawai tentang faktor – faktor tidak optimalnya fungsi kawasan pusat pemerintahan, sedangkan SPSS digunakan untuk menganalisis data penelitian bersifat korelasi (hubungan) maka dapat di analisis dengan analisis non parametrik menggunakan Rank Spearman Tests yaitu sebuah ukuran hubungan antara dua variable, yaitu variabel X dan variabel Y. Rumus *Rank Spearman Test*:

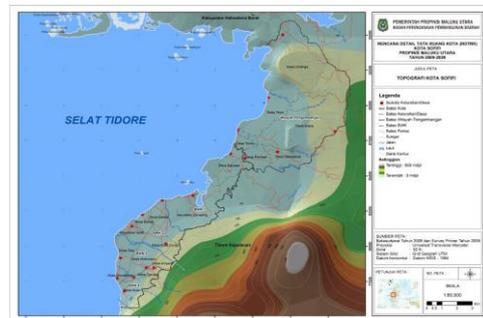
$$\rho = 1 - \frac{6\sum d^2}{n(n^2-1)}$$

Dimana:

- $\rho$  : koefisien korelasi *Rank Spearman*
- d : perbedaan antar rangking
- n : jumlah sampel

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

terdiri dari lahan dengan kelerengan 015%. Wilayah tersebut sebagian besar merupakan hamparan yang terbentang dari perbatasan Bukit Gosale ke arah pantai. Hanya 26% (9.776 Ha) dari total luas wilayah Kota Sofifi yang memiliki kelerengan lebih dari 40%.

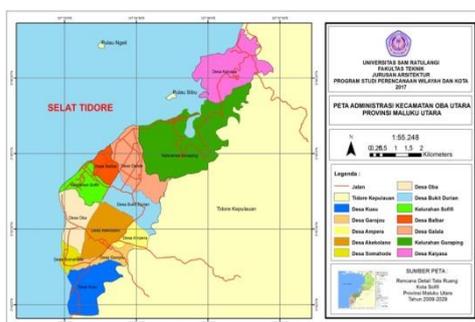


Gambar 3 Peta Topografi Kota Sofifi

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Oba Utara merupakan salah satu kecamatan di kota Tidore Kepulauan yang wilayahnya terbagi dalam 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Sofifi dan Guraping, dan juga 10 desa, yaitu desa Kaiyasa, Galala, Balbar, Durian, Akekolano, Oba, Ampera, Gorojou, Somahode, dan Kusu. Seluruh kawasan di daerah ini dikelilingi oleh laut dan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Halmahera Selatan
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah
- Sebelah Barat dengan Kota



Gambar 2 Peta Administrasi kecamatan Oba Utara

### Topografi

Berdasarkan kondisi kelerengan lahan, Kecamatan Oba Utara memiliki wilayah yang sebagian besar (54% atau seluas 20.304 Ha)

### Demografi

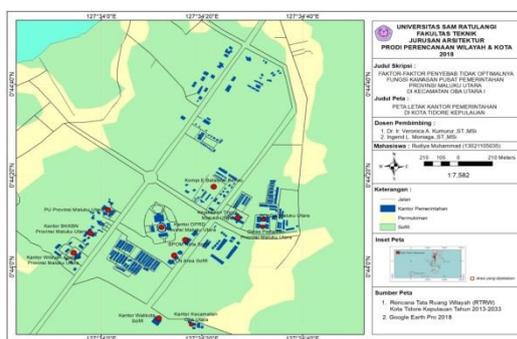
Tabel 1 Jumlah Penduduk i Kecamatan Oba Utara

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Somahode	302	300	603
2	Akekolano	492	451	943
3	Oba	353	345	698
4	Sofifi	1.007	990	
5	Guraping	1704	1661	3365
6	Kaiyasa	333	311	644
7	Gorojou	415	417	832
8	Kusu	637	562	1.199
9	Ampera	328	319	647
10	Bukit Durian	771	781	1.552
11	Galala	1.040	997	2.037
12	Balbar	591	565	1.155
13	Jumlah	8018	7700	15.718

### Kawasan Pusat Pemerintahan

Kantor - kantor pemerintah yang terdapat di wilayah perencanaan tahun 2010 lalu masih berupa bangunan setengah jadi yang belum selesai proses pembangunannya, namun pembangunan kini telah rampung untuk kantor – kantor Pemerintahan sehingga dapat

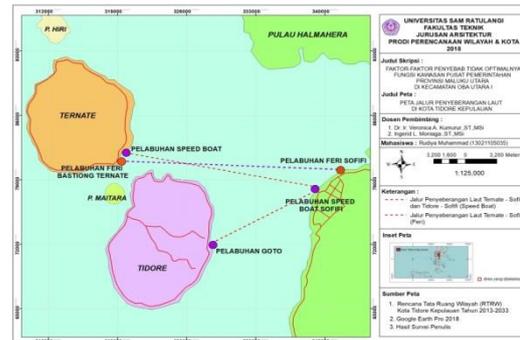
beroperasi sebagaimana mestinya. Namun dengan selesainya Pembangunan kantor – kantor Pemerintahan dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, Kawasan Pemerintahan justru terlihat sunyi, dalam artian pegawai – pegawai yang bekerja di Kawasan Pusat pemerintahan tidak menjalankan kewajiban mereka dengan baik. Pengamatan yang saya dapat di lapangan pegawai jarang ke kantor dengan berbagai alasan, alasan yang paling kuat karena faktor Aksesibilitas dan faktor Ekonomi, karena yang bekerja di Kantor – kantor Pemerintahan 70% Bertempat tinggal di ternate, 14% dari Tidore dan 16% dari Kecamatan Oba Utara.



Gambar 4 Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan

### Aksesibilitas Kawasan Pusat Pemerintahan

Akses pegawai ke kawasan Pemerintahan jika bertempat tinggal di sekitaran Kecamatan Oba Utara menggunakan transportasi bentor, atau menggunakan kendaraan pribadi. Namun yang tinggal di Ternate dan Tidore harus menggunakan transportasi Kapal fery dan Speed Boat ( kapal cepat). Pen Jarak dari kota Ternate menuju Kawasan Pemerintahan yang jauh, membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu 45 menit dengan menggunakan kapal cepat (Speed Boat) dengan tarif 50.000 dari pelabuhan Speed Boat Mangga Dua Ternate menuju ke pelabuhan Speed Boat Sofifi, dan yang menggunakan Kapal Feri membutuhkan waktu 90 menit dengan tarif yang lebih murah yaitu 25.000 dari Pelabuhan Feri Bastiong Ternate menuju pelabuhan Speed Boat Sofifi. Dengan tingkat aksesibilitas yang seperti diatas membuat pegawai lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai di Kantor – kanror pemerintahan di Kecamatan Oba Utara.



Gambar 5 Aksesibilitas menuju Kawasan Pusat Pemerintahan

### Pegolahan Data

Varibel yang diteliti dalam penelitian ini adalah hubungan antara Tidak Optimalnya Fungsi Kawasan Pusat Pemerintahan di Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Oba Utara dengan Faktor Aksesibilitas yaitu jarak, waktu perjalanan dan moda transportasi yang digunakan juga Faktor Ekonomi yaitu biaya atau pengeluaran pegawai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji kolerasi *Rank Spearman* karena data yang diperoleh adalah berupa data ordinal yang diperoleh dengan pembagian kuisioner dengan jenis skala Likert. Uji koefisien kolerasi ini di maksudkan untuk menguji hubungan dari variabel Y dan X.

Hipotesis umum antara faktor Tidak Optimalnya Kawasan Pusat Pemerintahan di Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Oba Utara sebagai berikut:

- Hipotesis Nol ( $H_0: \rho = 0$ ) Tidak terdapat hubungan Terhadap Tidak Optimalnya Kawasan Pusat Pemerintahan
- Hipotesis Alternatif ( $H_a: \rho \neq 0$ ) Terdapat hubungan Terhadap Tidak Optimalnya Kawasan Pusat Pemerintahan

### 1. Korelasi Antara Jarak Terhadap Tidak Optimalnya Fungsi Kawasan Pusat Pemerintahan

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar - 0,602 dengan tingkat signifikansi untuk hipotesis umum sebesar 0,000 pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ), adapun kriteria pengujian:

- Jika nilai koefisien korelasi > nilai kritis tabel, maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

2. Jika taraf signifikansi  $<$  nilai  $\alpha$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dari hasil SPSS bisa kita lihat bahwa:

1. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,602  $>$  nilai kritis tabel sebesar 0,000
2. Nilai signifikansi 0,000  $<$  nilai  $\alpha$  sebesar 0,05.

Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara perubahan jarak terhadap tidak optimalnya kawasan pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Oba Utara. Dimana perubahan jarak pegawai mempengaruhi Tidak Optimalnya Kawasan Pusat Pemerintahan. Hubungan ini ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar 0,602 yang termasuk dalam kategori kuat (0,60-0,799).

## **2. Korelasi Antara Moda Transportasi Terhadap Tidak Optimalnya Kawasan Pusat Pemerintahan**

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,531 dengan tingkat signifikansi untuk hipotesis umum sebesar 0,000 pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ), adapun kriteria pengujian:

1. Jika nilai koefisien korelasi  $>$  nilai kritis tabel, maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
2. Jika taraf signifikansi  $<$  nilai  $\alpha$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dari hasil SPSS bisa kita lihat bahwa:

1. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,531  $>$  nilai kritis tabel sebesar 0,000
2. Nilai signifikansi 0,000  $<$  nilai  $\alpha$  sebesar 0,05.

Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara Moda Transportasi Terhadap Tidak Optimalnya Kawasan Pusat Pemerintahan di Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Oba Utara. Dimana Moda Transportasi yang digunakan pegawai mempengaruhi Tidak Optimalnya Kawasan Pusat Pemerintahan. Hubungan ini ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar 0,531 yang termasuk dalam kategori sedang (0,40-0,599).

## **3. Korelasi Antara Waktu Tempuh Terhadap Tidak Optimalnya Kawasan Pusat Pemerintahan**

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,657 dengan tingkat signifikansi untuk hipotesis umum sebesar 0,000 pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ), adapun kriteria pengujian:

1. Jika nilai koefisien korelasi  $>$  nilai kritis tabel, maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
2. Jika taraf signifikansi  $<$  nilai  $\alpha$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dari hasil SPSS bisa kita lihat bahwa:

1. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,657  $>$  nilai kritis tabel sebesar 0,000
2. Nilai signifikansi 0,000  $<$  nilai  $\alpha$  sebesar 0,05.

Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara waktu tempuh terhadap Tidak Optimalnya Kawasan Pusat Pemerintahan di Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Oba Utara. Dimana waktu tempuh yang dibutuhkan pegawai mempengaruhi Tidak Optimalnya Kawasan Pusat Pemerintahan. Hubungan ini ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar 0,602 yang termasuk dalam kategori kuat (0,60-0,799).

## **4. Korelasi Antara Biaya Terhadap Tidak Optimalnya Kawasan Pusat Pemerintahan**

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,602 dengan tingkat signifikansi untuk hipotesis umum sebesar 0,000 pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ), adapun kriteria pengujian:

1. Jika nilai koefisien korelasi  $>$  nilai kritis tabel, maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
2. Jika taraf signifikansi  $<$  nilai  $\alpha$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dari hasil SPSS bisa kita lihat bahwa:

1. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,602  $>$  nilai kritis tabel sebesar 0,000.
2. Nilai signifikansi 0,000  $<$  nilai  $\alpha$  sebesar 0,05.

Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara biaya yang dikeluarkan pegawai Terhadap Tidak Optimalnya Kawasan Pusat Pemerintahan di Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Oba Utara. Dimana biaya

mempengaruhi Tidak Optimalnya Kawasan Pusat Pemerintahan. Hubungan ini ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar 0,602 yang termasuk dalam kategori kuat (0,60-0,799).

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan mengenai faktor – faktor penyebab tidak optimalnya fungsi Kawasan pusat Pemerintahan provinsi Maluku Utara di Kecamatan Oba Utara dapat disimpulkan bahwa Faktor aksesibilitas yaitu perubahan jarak, Moda Transportasi, juga perubahan waktu tempuh dan faktor ekonomi pegawai yaitu biaya untuk melakukan perjalanan kerja menuju kawasan pusat pemerintahan yang terpisah dari tempat tinggal pegawai, karena 88 % pegawai bertempat tinggal di luar kecamatan Oba Utara. sesuai dengan analisis yang digunakan menemukan Hubungan antara jarak ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar 0,602 yang termasuk dalam kategori kuat (0,60-0,799) , Moda transportasi ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar 0,531 yang termasuk dalam kategori sedang (0,40-0,599) waktu tempuh ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar 0,657 yang termasuk dalam kategori kuat (0,60-0,799) dan biaya yang ditunjukkan dengan nilai korelasi sebesar 0,602 yang termasuk dalam kategori kuat (0,60-0,799). Sehingga dapat disimpulkan Faktor jarak, Moda Transportasi, juga perubahan waktu tempuh dan biaya berpengaruh terhadap tidak optimalnya Fungsi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Oba Utara.

### SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang ingin disampaikan oleh penulis adalah

1. Penentuan Lokasi kawasan Pusat pemerintahan Harus memperhatikan faktor aksesibilitas dan Faktor Ekonomi
2. Pemerintah bisa menyediakan Transportasi kapal Express gratis untuk pegawai yang tinggal di luar kecamatan Oba Utara menuju kawasan pusat pemerintahan, Sehingga kantor – kantor pemerinthan dapat berfungsi secara Optimal tanpa alasan waktu

tempuh dan moda transportasi yang dibutuhkan.

3. Tarif/ongkos harus disesuaikan dengan kondisi Pendapatan pegawai yang melakukan perjalanan kerja pulang pergi Sofifi – Ternate, Sofifi – Tidore.
4. Pemerintah membuat jembatan penyebrangan Ternate – Sofifi untuk mempermudah transportasi pegawai yang tinggal di luar Kecamatan Oba Utara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, S. A. 2012. Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah. Yogyakarta: Garaha Ilmu
- Adman R. 2008. “Analisis Lokasi Optimal Pusat Pemerintahan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi”. *Skripsi* . Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Alhafizh R dan Daud J. 2014. Studi Kinerja Dan Tarif Moda Angkutan Penyeberangan Sungai (Studi Kasus: Tanjung Sarang Elang – Labuhan Bilik). Medan: jurnal Teknik Sipil, Universitas Sumatera Utara
- Anonim, 1999. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 1999 tentang Angkutan Perairan
- , 2007. Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah juga menguatkan fenomena pembentukan kota baru di Indonesia.
- , 2013. RTRW Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 - 3033
- , 2003. UU No 1 tahun 2003 tentang pembentukan Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Timur, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Kepulauan Sula dan Kota Tidore.
- , 1999. UU No 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara,

- Kabupaten buru, dan kabupaten Maluku Tenggara Barat
- , 2007. UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- , 2016. Kecamatan Oba Utara Dalam Angka 2016
- , 2003. Keputusan Menteri No. 58 tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyebrangan
- Aurumbita, Y.N. 2015. “Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarbaru”. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Azis R, Asrul dan Risman. 2016. Model Pemilihan Moda Transportasi Laut pada Wilayah Geografis Kepulauan; Studi Kasus Rute Kota Kendari-Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Kendari: jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol . 27, no. 2: 151-172
- Darmanto. 2014. “Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Jasa Transportasi Penyeberangan antar Pulau di Kota Raha”. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar
- Farida U. 2013. Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. *Jakarta: Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*. Vol. 1, No. 1: 49-66
- Gomudha W. 2001. “Kelurahan Sempidi Sebagai Alternatif Pilihan Ideal Lokasi Tapak Pusat Pemerintahan Kabupaten [ Ppk ] Badung” *Seminar Pembangunan Pusat Pemerintahan Yang Berwawasan Pelestarian Alam Dan Budaya*. Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Unud Diselenggarakan Oleh: Dprd Kabupaten Badung
- Harzan M. 2015. “Analisis Lokasi Optimal Pusat Pemerintahan dalam Rangka Pengembangan Wilayah di Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara”.
- Skripsi*. Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Jusna dan Nempung T. 2016. Peranan Transportasi Laut Dalam Menunjang Arus Barang Dan Orang Di Kecamatan Maligano Kabupaten Muna. *Kendari: jurnal ekonomi*. Vol .1, no 1: 2503-1937
- Lestarini. 2007. “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Pemilihan Moda Transportasi Untuk Perjalanan Kerja (studi khusus karyawan PT.SSSWI Kabupaten Wonosobo)”. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Megister Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang.
- Martono, Nanang. 2010. *Statistik Sosial*. Gava Media: Yogyakarta.
- Sadan, Agus S. 2014. *Perencanaan Kawasan Permukiman*. Yogyakarta: Garaha Ilmu
- Tarigan, R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta: PT Bumi Aksara